

## MENGAMATI PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL DALAM PENENTUAN KUALITAS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Azkalina Diazani <sup>1)</sup>; Puji Wibowo <sup>2)\*</sup>;

<sup>1)</sup> [azkalinadiazani@gmail.com](mailto:azkalinadiazani@gmail.com), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [puji.wibowo@pknstan.ac.id](mailto:puji.wibowo@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

\* untuk penulis korespondensi

### Abstract

*Fiscal analysis at the regional level is needed as a consideration for policy-making so that the policies taken can be truly in accordance with the needs and characteristics of each region. The results of this fiscal analysis are reflected in a report, namely the Regional Government Financial Statistics Report (LSKP-TW) so that the quality of LSKP-TW becomes an important element. This study aims to examine the effect of human resource competence and information technology on the quality of LSKP-TW with digital leadership as a moderating variable. This study uses a quantitative approach by applying the Structural Equation Modeling (SEM) method to test existing hypotheses. The research respondents were a saturated sample consisting of 75 employees of the Analytical, Statistical, and Financial Reporting Section of the Regional Office of DJPb as the compiler of LSKP-TW. This study concluded that only information technology has a significant positive influence on the quality of LSKP-TW. HR competence has no effect on the quality of LSKP-TW. Digital leadership also cannot moderate the relationship between HR competencies and information technology on the quality of LSKP-TW. This research is expected to be an important reference related to improving the quality of LSKP-TW.*

**Keywords:** Digital leadership, Government Financial Statistics, Human resource competencies, Information technology, LSKP-TW quality

### Abstrak

Analisis fiskal di lingkup regional diperlukan sebagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Hasil analisis fiskal ini tercermin dalam sebuah laporan yaitu Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) sehingga kualitas LSKP-TW menjadi elemen yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW dengan kepemimpinan digital sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hipotesis yang ada. Responden penelitian merupakan sampel jenuh yang terdiri dari 75 pegawai seksi Analitika, Statistika, dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb selaku penyusun LSKP-TW. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya teknologi informasi yang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas LSKP-TW. Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LSKP-TW. Kepemimpinan digital juga tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting terkait peningkatan kualitas LSKP-TW.

**Kata Kunci:** Government Financial Statistics, Kepemimpinan digital, Kompetensi SDM, Kualitas LSKP-TW, Teknologi informasi

## PENDAHULUAN

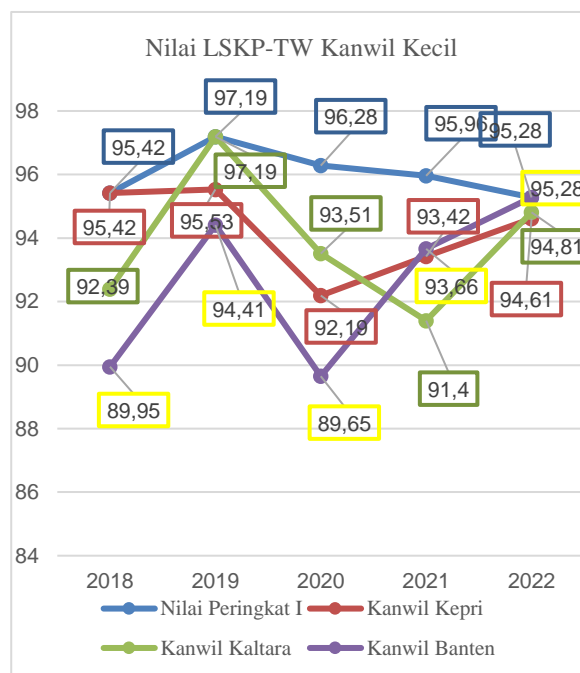
Analisis fiskal adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami kinerja fiskal suatu pemerintah. Analisis fiskal dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperkirakan efektivitasnya dalam mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menunjang perekonomian nasional, dan mencapai kestabilan ekonomi (Nangarumba, 2016; Juliani, 2020). Analisis fiskal juga dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan fiskal yang dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi, melonjaknya tingkat kemiskinan, defisit anggaran yang besar, dan pengeluaran yang tidak efisien sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan fiskal yang lebih baik dan lebih rasional (Heliany, 2021). Informasi terkait pengeluaran dan penerimaan lingkup regional merupakan hal yang tidak kalah penting sebagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan di

bidang keuangan negara agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Terlebih Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki budaya, kondisi geografis, dan tingkat kesejahteraan yang beragam.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah diamanatkan untuk melaksanakan peran *Regional Chief Economist* (RCE) yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan analisis fiskal atas wilayah kerjanya. Pelaksanaan peran ini tercermin salah satunya dalam sebuah laporan manajerial yaitu Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) yang menyajikan data komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah (DJPb, 2017). LSKP-TW merupakan hasil konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) yang telah disesuaikan ke Bagan Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah (Kemenkeu, 2018).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sendiri menjadikan kualitas LSKP-TW sebagai salah satu perhatian utama. DJPb secara konsisten melakukan penilaian tahunan terhadap LSKP-TW dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas laporan sekaligus memberikan apresiasi kepada Kanwil DJPb. Beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian mencakup kualitas laporan, ketepatan waktu, estetika penyajian, dan partisipasi (DJPb, 2023). Penilaian dan penentuan peringkat dilakukan dalam tiga kelompok penilaian yaitu Kelompok Kanwil Besar, Kanwil Sedang, dan Kanwil Kecil. Pengelompokan Kanwil DJPb tersebut didasarkan pada indeks beban kerja masing-masing Kanwil DJPb (DJPb, 2023). Tren hasil penilaian kualitas LSKP-TW yang didapatkan oleh masing-masing kelompok penilaian dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif dengan peraih peringkat pertama yang rata-rata selalu berbeda setiap tahunnya. Nilai LSKP-TW yang fluktuatif ditunjukkan salah satunya dalam Gambar 1 yang mengambil tiga peringkat teratas LSKP-TW kelompok Kanwil Kecil tahun 2022 yaitu Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, dan Kanwil DJPb Provinsi Banten sebagai contoh (DJPb, 2019; DJPb, 2020; DJPb, 2021; DJPb 2022; DJPb 2023).

**Gambar 1. Nilai LSKP-TW Kanwil Kecil**



Sumber: diolah dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan 2019-2023

Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh kantor pusat DJPB pada tahapan penyusunan LSKP-TW dianggap melatarbelakangi ketidakstabilan nilai perolehan LSKP-TW. Proses konsolidasi dilakukan menggunakan kertas kerja manual sebelum adanya bantuan teknologi informasi karena data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak berada dalam satu database yang sama. Sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum tersedia (Kemenkeu, 2018). Proses penyusunan juga sering kali terhambat karena kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih tergolong rendah. Penyusun LSKP-TW masih sering menemukan data LKPD tidak sesuai antar komponen laporan keuangan, LKPD tidak komprehensif dan lengkap, kesulitan mendapatkan data LKPD, dan data LKPD yang disampaikan masih belum final karena periode penyusunan LKPD dan LSKP-TW tidak sama (Baihaqi & Halim, 2020; DJPb, 2022). Konsolidasi yang masih dilakukan secara manual juga membuat proses pengolahan data memakan waktu relatif lebih lama dan rentan mengandung kesalahan karena masih sangat bergantung terhadap ketelitian dan kinerja masing-masing penyusun LSKP-TW. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan kualitas LSKP-TW antar wilayah. Selain itu, masih terdapat perbedaan antara sistem akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk Bagan Akun Standar (BAS) pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah (Kemenkeu, 2014).

Penyusunan LSKP-TW pada tahun 2021 diinisiasi untuk mulai menggunakan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) berdasarkan berbagai kondisi tersebut. SIKRI mengintegrasikan informasi keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan oleh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan informasi keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai bagian dari perwujudan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara (DJPb, 2021). Mahmoodi & Nojedeh (2016) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi pada layanan pemerintahan meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan efektivitas, menghemat waktu pemberian pelayanan, dan menekan biaya menjadi lebih rendah. Teknologi informasi perlu ditunjang oleh sumber daya manusia dalam pengoperasiannya. Sumber daya berwujud yang dimiliki sebuah organisasi tidak dapat memberikan nilai tambah sendiri (bersifat pasif) jika tidak dikombinasikan dengan sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menciptakan nilai bagi organisasi tersebut (Ongkorahardjo et al., 2008). Menurut Totanan (2004) dalam Ongkorahardjo et al. (2008), sebuah organisasi akan menghasilkan kinerja yang berbeda apabila pengelolaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang berbeda pula.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah mencoba mengaitkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Muda et al. (2017) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Zubaidi et al. (2019) atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Situbondo, dan Andini & Yusrawati (2021) terhadap Laporan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Ketiga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan dan semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut.

Di sisi lain, beberapa penelitian justru menunjukkan hasil yang berbeda. Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Wijayanti & Handayani (2017)

menemukan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun. Sundari & Rahayu (2019) menemukan bahwa secara bersamaan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Bandung. Namun, secara parsial pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hakim & Wibowo (2021) juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen dan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi tidak memberikan pengaruh positif berupa peningkatan kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum lingkup Rumah Sakit Pemerintah Pusat.

Dari berbagai penelitian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi dalam hal ini yaitu aplikasi SIKRI terhadap peningkatan kualitas LSKP-TW. Selain itu, penelitian ini menambahkan pengaruh kepemimpinan digital sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah keberadaannya akan memperkuat atau justru memperlemah pengaruh kompetensi sumber daya manusia serta penerapan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW. Transformasi digital memiliki dampak yang masif termasuk pada sektor publik yang menuntut pimpinan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dan kompetensi yang dimilikinya agar mampu melewati berbagai tantangan dan berhasil memanfaatkan potensi dari transformasi digital tersebut. Terminologi kepemimpinan digital pun muncul sebagai cara baru untuk memahami kepemimpinan di era digitalisasi (Beile et al., 2019 dalam Kusanke et al., 2023). Perbedaan hasil penelitian sebelumnya semakin menguatkan dorongan untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan memperoleh pemahaman empiris mengenai sejauh mana pengaruh dari variabel yang sama jika diterapkan untuk kualitas LSKP-TW. Pengaruh kepemimpinan digital juga menjadi hal yang menarik untuk ditambahkan sebagai pembaruan. Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW dengan kepemimpinan digital sebagai variabel moderasi

## KAJIAN PUSTAKA

Teori *Resource-Based View* (RBV) menitikberatkan bahwa sumber daya organisasi dapat menjadi kekuatan organisasi dan memungkinkan organisasi tersebut menciptakan keunggulan kompetitif (Barney, 1991). Sumber daya suatu organisasi terdiri dari seluruh aset yang dimiliki, kemampuan, proses bisnis organisasi, informasi, pengetahuan, dan berbagai hal lainnya yang berada di bawah pengelolaan organisasi agar dapat menyusun dan menerapkan strategi yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi (Barney, 1991). Sumber daya yang berharga, langka, tidak dapat diduplikasi, dan tidak dapat digantikan menjadi kriteria sebuah sumber daya dapat memungkinkan sebuah organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Pengelolaan sumber daya tersebut seringkali menimbulkan konflik keagenan antara pihak yang memberikan amanah (*principal*) dengan pihak yang menjalankan amanah (*agent*). Konflik tersebut biasanya direduksi melalui proses akuntabilitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, hubungan keagenan dalam penyusunan laporan keuangan menimbulkan sebuah permasalahan klasik yaitu asimetri informasi (Shapiro, 2005). Teori keagenan menempatkan pemerintah yang menyusun laporan keuangan sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dalam konteks pembuatan laporan keuangan. Masyarakat ingin mengetahui bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara melalui laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah informasi yang disajikan akurat dan relevan jika tidak ada transparansi. Laporan keuangan yang disusun rentan memiliki kualitas yang buruk atau tidak mencerminkan keadaan

yang sebenarnya apabila asimetri informasi yang ada terlalu besar. Prinsipal akan mencoba mengurangi asimetri informasi dengan memasang sistem informasi dan melakukan pemantauan untuk mengatasi hal ini.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Barney (1991) mengelompokkan sumber daya organisasi ke dalam tiga kelompok utama yaitu sumber daya modal fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya modal organisasi. Sumber daya manusia mencakup pelatihan, pengalaman, penilaian, kecerdasan, hubungan, dan pandangan yang dimiliki setiap individu di dalam organisasi. Hermelinda (2018) mendefinisikan kompetensi SDM sebagai kemampuan suatu individu, organisasi, atau sistem untuk melaksanakan kewenangannya demi mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Kemampuan ini dapat disebut juga sebagai kapasitas untuk mencapai kinerja yang dapat dinilai dengan melihat keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Penelitian yang dilakukan oleh Idzdiana et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dengan kompetensi sumber daya karena dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki pegawai tersebut. Apabila penyusun laporan keuangan memiliki kompetensi yang baik, penyusun dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas maupun program sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Firmansyah et al. (2020) menyebutkan kompetensi yang dimiliki oleh penyusun laporan keuangan membantu laporan keuangan tersebut untuk memiliki informasi keuangan yang andal untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pengguna. Kompetensi ini meliputi kemampuan penyusun untuk memahami aspek penyusunan laporan keuangan dan pemahaman terkait akuntansi. Kemampuan akuntansi menjadi kompetensi dasar bagi penyusun laporan keuangan sehingga penyusun dapat memahami informasi yang ada dan keakuratan laporan yang disusunnya (*self-checking*). Penyusun laporan keuangan yang memahami dengan baik standar akuntansi pemerintahan yang berlaku juga diharapkan akan dapat menerapkan prinsip akuntansi yang memadai sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam. Pemahaman yang menyeluruh terkait peraturan yang berlaku selain dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, membentuk sumber daya manusia yang semakin kompeten. Penyusun laporan keuangan dapat memberikan arahan yang jelas dalam memperlakukan setiap transaksi keuangan yang ada dan menghasilkan informasi yang lebih akurat.

*H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas LSKP-TW*

### **Teknologi Informasi**

Sumber daya modal fisik meliputi teknologi yang digunakan oleh organisasi, bangunan dan peralatan organisasi, lokasi geografis, dan akses yang dimiliki organisasi kepada bahan baku dapat menjadi kekuatan organisasi menurut teori RBV (Barney, 1991). Sutabri (2014) dalam Sundari & Rahayu (2019) menyebutkan teknologi informasi sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengolah data yang terdiri dari tahapan mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data menggunakan berbagai cara untuk dapat diambil informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam pelayanan publik merupakan tujuan dari penerapan teknologi informasi.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Hertati (2015) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Zubaidi (2019) memiliki hasil penelitian serupa dengan hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa

dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara bersamaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian Hermelinda (2018). Ketersediaan teknologi mumpuni yang dimanfaatkan secara optimal serta kemudahan akses terhadap teknologi informasi tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang tersusun memiliki kualitas yang baik dengan semakin terpenuhinya aspek relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami pengguna. Dampak lebih luas dari penerapan teknologi informasi adalah terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada secara efektif.

*H<sub>2</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas LSKP-TW*

### **Kepemimpinan Digital**

Perkembangan teknologi informasi menuju era transformasi digital menciptakan sebuah tantangan bagi organisasi agar dapat beradaptasi. Tantangan tersebut mendorong organisasi untuk dapat mengembangkan strategi yang dapat memanfaatkan tantangan tersebut menjadi sebuah peluang (Fajriyani et al., 2023). Teknologi informasi yang digunakan dalam sektor pemerintahan meningkatkan potensi penerimaan informasi menjadi lebih mudah, pemberian pelayanan menjadi lebih cepat, dan membantu para pemimpin dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat sasaran dengan memanfaatkan *big data* (Purwoko et al., 2022). Peran seorang pemimpin sangat menentukan untuk mewujudkan hal ini. Pemimpin digambarkan sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk mengarahkan organisasi menuju tujuan yang ingin dicapai dan membangun keunggulan kompetitif (Yusuf et al. 2023). Kepemimpinan juga memiliki kapabilitas untuk menginspirasi organisasi agar dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik (Obiwuru, 2011 dalam Suwarno & Bramantyo, 2019). Hal ini menitikberatkan pentingnya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kompetensi yang menggambarkan sebuah kepemimpinan digital pada era transformasi digital.

Gaya kepemimpinan digital menuntut seorang pemimpin menjadi sosok yang kreatif, inovatif, dan solutif. Implementasi dari karakter tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Purwoko et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto et al. (2021) mendukung pernyataan sebelumnya dengan membuktikan bahwa kepemimpinan digital berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja industri manufaktur. Peningkatan kinerja melalui transformasi digital tetap perlu ditunjang oleh kompetensi pegawai yang memadai serta pemenuhan kebutuhan seperti sarana dan prasarana untuk menerapkan teknologi informasi tersebut. Studi yang dilakukan oleh Shin et al. (2023) pada industri Korea Selatan membuktikan bahwa kepemimpinan digital memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pegawainya. Transformasi digital membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan mumpuni untuk mengoperasikan teknologi informasi dan komputer. Seorang pemimpin digital yang kompeten dapat memengaruhi pegawai untuk meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan organisasi. Sebagai hasilnya, kompetensi pegawai dapat membantu untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa organisasi yang tidak memiliki kepemimpinan digital telah gagal dalam memanfaatkan potensi penuh teknologi. Alasan utama kegagalan (hampir 70 persen) disebabkan oleh ketidakcukupan kemampuan untuk mendefinisikan dan melaksanakan langkah-langkah yang benar dalam penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital (Boomer, 2019; Saldanha, 2019). Penting bagi organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi transformasi digital dan memastikan bahwa kapabilitas organisasi cukup untuk mengelola teknologi informasi secara efisien. Dalam

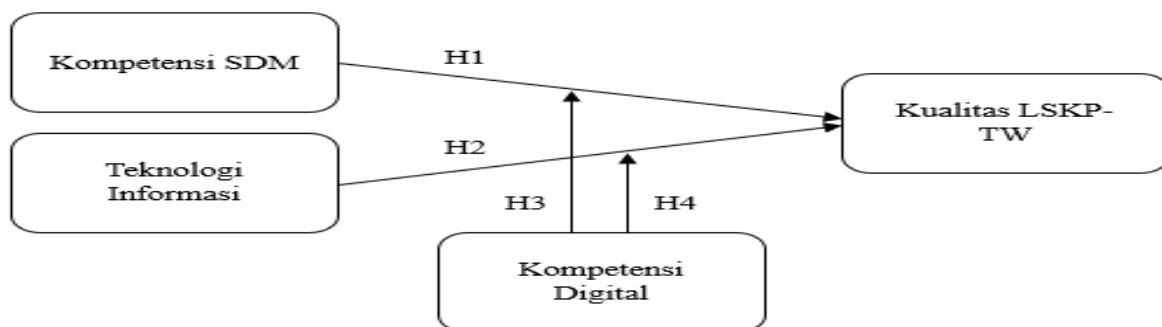
konteks ini, kapabilitas dianggap sebagai penerapan strategis, pembaruan, perluasan, modifikasi, dan perubahan sumber daya untuk memastikan efektivitas dan daya saing organisasi. Brunner et al. (2021) menemukan terdapat korelasi antara kepemimpinan digital dan penerapan teknologi informasi dimana kepemimpinan digital memiliki pengaruh positif terhadap penerapan teknologi informasi. Organisasi yang berfokus memenuhi kompetensi kepemimpinan digital terbukti memiliki dampak yang lebih tinggi terhadap pengoptimalan penggunaan teknologi informasi sebagai bentuk transformasi digital sehingga dapat menjadi sebuah keuntungan bagi organisasi.

*H<sub>3</sub>: Kepemimpinan digital memperkuat pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LSKP-TW*

*H<sub>4</sub>: Kepemimpinan digital memperkuat pengaruh variabel teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW*

Berdasarkan hal tersebut, hubungan atas determinan kualitas LSKP-TW dapat digambarkan menjadi kerangka penelitian berikut.

**Gambar 2. Kerangka Penelitian**



Sumber: data diolah penulis (2023)

## METODE

Penelitian ini merupakan riset kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei. Arikunto (2005) dalam Putra (2016) menyatakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu variabel secara apa adanya. Dipadukan dengan metode kuantitatif, penelitian ini melihat, meninjau, dan menggambarkan objek yang diteliti dengan keadaan apa adanya melalui analisis data berupa angka untuk menarik kesimpulan terkait fenomena yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Penelitian menggunakan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan lingkup responden yang terbatas pada pegawai seksi Analitika, Statistika, dan Pelaporan Keuangan (ASPLK) Kanwil DJPb seluruh Indonesia selaku penyusun LSKP-TW. Total responden sebanyak 75 pegawai digunakan dalam penelitian. Jumlah tanggapan ini sesuai dengan total seluruh pegawai seksi Analitika, Statistika, dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb seluruh Indonesia sehingga penelitian ini menggunakan keseluruhan populasi atau dapat dikatakan merupakan sampel jenuh (Sugiyono, 2011 dalam Susilowati, 2019). Penyebaran kuesioner dilakukan melalui tautan *online Google Form* sebagai sarana untuk mendapatkan data responden. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertanyaan terkait identitas responden (jenis kelamin, usia, wilayah kerja, pendidikan terakhir, dan jabatan) dan pertanyaan terkait persepsi responden terhadap pengaruh komponen kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW serta kepemimpinan digital sebagai variabel moderasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan kualitas LSKP-TW. Indikator yang dibangun untuk kualitas LSKP-TW dikembangkan kembali berdasarkan karakteristik kualitatif

yang perlu dimiliki oleh laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah. Pengembangan indikator ini didasarkan dengan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2023, dan *Data Quality Framework Australia Bureau of Statistics*. Sementara itu, variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi. Indikator kompetensi sumber daya manusia dikembangkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Indikator penerapan teknologi informasi dikembangkan dengan mengacu pada *Delone-McLean Information Systems Success Model* (Delone & McLean, 2003). Indikator variabel moderasi kepemimpinan digital dikembangkan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shin et al. (2023), Magesa & Jonathan (2023), Kusanke et al. (2023), dan Munsamy et al. (2023). Skala pengukuran setiap item kuesioner menggunakan skala likert dengan rentang angka 1-6 dengan skala (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Ragu-ragu (RG), (4) Cukup Setuju (CS), (5) Setuju, dan (6) Sangat Setuju (SS).

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap inner model dan outer model sesuai metode SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS versi 4.0 (Pering, 2021; Hair et al., 2019). Validasi hasil analisis dan pengujian data juga akan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa sumber yaitu Kepala Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah selaku konsolidator LSKP-TW seluruh Indonesia dan penyusun LSKP-TW di daerah. Wawancara ini dilakukan untuk menambah pemahaman yang lebih komprehensif atas hasil penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dari penelitian ini merupakan 75 pegawai seksi Analitika, Statistika, dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb seluruh Indonesia. Tabel 1 menunjukkan gambaran distribusi responden dalam studi ini.

**Tabel 1. Distribusi Responden**

Kategori	Distribusi	Jumlah	Total
Jenis Kelamin	Pria	47	75
	Wanita	28	
Umur	< 25 tahun	14	75
	25-35 tahun	22	
	35-45 tahun	30	
	> 45 tahun	9	
Pendidikan Terakhir	Diploma I/III	29	75
	Diploma IV/S1	25	
	S2	21	
Jabatan	Kepala Seksi	41	75
	Pelaksana	34	
Wilayah Kerja	Kanwil Besar	27	75
	Kanwil Sedang	23	
	Kanwil Kecil	25	

Sumber: diolah penulis (2023)

Pengujian validitas konvergen dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan konstruk untuk menjelaskan varians indikatornya. Pengujian ini dapat dilakukan yang pertama dengan melihat nilai *loading factor* indikator. Nilai *loading factor* mampu menggambarkan hubungan antara variabel laten dan indikatornya (Hair et al., 2019). Hair et al. (2019) merekomendasikan nilai *loading factor* di atas 0,7 karena hal ini mengindikasikan bahwa konstruk menjelaskan lebih dari 50% varians indikator. Beberapa indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,7 dianggap kurang valid dan perlu dihapus terlebih dahulu, antara lain KOM 1, KOM 2, KOM 3, KOM 4, TI 10, KL 5, dan KL 8.

**Tabel 2. Nilai *Loading factor Indicator***

Variabel	Indikator	<i>Loading factor</i>	Ket.
Kompetensi SDM	KOM 5	0.749	Valid
	KOM 6	0.803	Valid
	KOM 7	0.797	Valid
	KOM 8	0.845	Valid
	KOM 9	0.744	Valid
	KOM 10	0.812	Valid
Teknologi Informasi	TI 1	0.772	Valid
	TI 2	0.818	Valid
	TI 3	0.734	Valid
	TI 4	0.834	Valid
	TI 5	0.810	Valid
	TI 6	0.758	Valid
	TI 7	0.723	Valid
	TI 8	0.797	Valid
	TI 9	0.822	Valid
	TI 11	0.823	Valid
	TI 12	0.887	Valid
	Kualitas LSKP-TW	KL 1	0.838
KL 2		0.742	Valid
KL 3		0.807	Valid
KL 4		0.870	Valid
KL 6		0.801	Valid
KL 7		0.764	Valid
Kepemimpinan Digital	KD 1	0.712	Valid
	KD 2	0.807	Valid
	KD 3	0.886	Valid
	KD 4	0.883	Valid
	KD 5	0.888	Valid
	KD 6	0.868	Valid
	KD 7	0.717	Valid
	KD 8	0.901	Valid
	KD 9	0.889	Valid
	KD 10	0.839	Valid
	KD 11	0.890	Valid
	KD 12	0.763	Valid

Sumber: diolah dengan *SmartPLS* (2023)

Pengujian validitas konvergen dari setiap pengukuran konstruk juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari setiap variabel. AVE yang dapat diterima adalah yang memiliki nilai 0,50 atau lebih tinggi (Hair et al., 2019).

**Tabel 3. Nilai AVE Variabel**

Variabel	AVE
KOM	0.628
TI	0.639
KL	0.648

Variabel	AVE
KD	0.705

Sumber: diolah dengan SmartPLS (2023)

Seluruh indikator variabel dalam Tabel 2 dan Tabel 3 memiliki nilai *loading factor* di atas 0.70 dan nilai AVE di atas 0.50 sehingga dapat dinyatakan keseluruhan indikator tersebut valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Pengujian dilanjutkan dengan menilai validitas diskriminan variabel untuk memastikan konstruk memiliki hubungan yang kuat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan indikator konstruk lain dalam sebuah model (Hair et al., 2022). Konstruk dianggap tidak memiliki masalah validitas diskriminan jika nilai HTMT konstruk di bawah 0.90. Tabel 4 menunjukkan nilai HTMT seluruh konstruk. Hasil rasio HTMT menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan diskriminan validitas pada model ini karena nilai HTMT seluruh konstruk berada di bawah 0.90. Hal ini memperkuat bahwa antara satu konstruk dengan konstruk lainnya berbeda.

**Tabel 4. Hasil Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT)**

	KD	KL	KOM	TI	KD x KOM
KD					
KL	0.661				
KOM	0.435	0.297			
TI	0.706	0.794	0.410		
KD x KOM	0.164	0.136	0.139	0.125	
KD x TI	0.587	0.423	0.079	0.481	0.013

Sumber: diolah dengan SmartPLS (2023)

Uji reliabilitas konsistensi internal dilakukan sebagai pengujian terakhir yang diukur menggunakan nilai  $\rho_A$ . Nilai  $\rho_A$  direkomendasikan setara dengan 0.70 atau lebih dari itu untuk menyatakan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang memadai (Hair et al., 2019). Seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha*,  $\rho_A$ , dan *composite reliability* di atas 0.70 sehingga dapat diasumsikan seluruh variabel dinilai reliabel atau konsisten jika digunakan oleh peneliti lain.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	$\rho_A$	Composite Reliability
KD	0.962	0.969	0.966
KL	0.891	0.898	0.917
KOM	0.882	0.888	0.910
TI	0.943	0.947	0.951

Sumber: diolah dengan SmartPLS (2023)

Ketika pengujian model pengukuran reflektif mendapatkan hasil yang memuaskan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian *inner model* (Hair et al., 2019). Pengujian *inner model* juga dilakukan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten (Ananda, 2017). Pertama, uji kolinearitas dilakukan untuk memastikan kolinearitas tidak memengaruhi hasil pengujian dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Idealnya, nilai VIF disarankan mendekati 3 atau lebih rendah (Hair et al., 2019). Seperti yang dapat dilihat di Tabel 6, nilai VIF sesuai dengan yang direkomendasikan yaitu lebih rendah dari 3. Hal ini berarti model struktural tidak mengalami permasalahan kolinearitas.

**Tabel 6. Uji Kolinearitas**

	VIF
KD -> KL	2.562
KOM -> KL	1.451
TI -> KL	1.971
KD x KOM -> KL	1.024
KD x TI -> KL	1.828

Sumber: diolah dengan *SmartPLS* (2023)

Pengujian dapat dilanjutkan dengan memeriksa nilai koefisien determinasinya ( $R^2$ ) dan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan melalui peninjauan  $P$  value melalui prosedur *bootstrap algorithm*. Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan signifikan apabila  $p$ -value bernilai lebih kecil dari level signifikansi yaitu 0,05. Hipotesis penelitian dikatakan dapat diterima jika syarat tersebut terpenuhi. Nilai *standardized path coefficients* yang didapatkan melalui nilai *original sample* menjadi acuan untuk melihat dampak positif atau negatif variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji hipotesis dan nilai koefisien determinasi dapat diamati melalui Tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi**

	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics ((O/STDEV))	P Values	$R^2$	$R^2$ adjusted
KOM -> KL	-0.052	0.106	0.490	0.312		
TI -> KL	0.593	0.136	4.374	0.000		
KD -> KL	0.275	0.147	1.875	0.030	0.585	0.555
KD x KOM -> KL	0.069	0.141	0.485	0.314		
KD x TI -> KL	0.035	0.117	0.299	0.383		

Sumber: diolah dengan *SmartPLS* (2023)

Nilai koefisien determinasi adalah nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen atau prediktor memengaruhi variabel dependen. Jika model regresi diterapkan dan diestimasi dengan tepat, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin baik pula kemampuan prediktor yang dipilih untuk dapat menjelaskan data dependen.  $R^2$  dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu nilai  $R^2$  0,75 termasuk ke dalam kategori kuat, nilai  $R^2$  0,50 termasuk ke dalam kategori moderat, dan nilai  $R^2$  0,25 termasuk ke dalam kategori lemah (Hair et al., 2011). Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi model penelitian ini bernilai 0.585 sehingga termasuk ke dalam kategori moderat. R-square bernilai 0.585 berarti 58,5% variabel kualitas LSKP-TW sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh model penelitian ini. Sedangkan, 41,5% lainnya mengindikasikan bahwa variabel kualitas LSKP-TW sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Pengaruh variabel lain dapat disebut juga sebagai error (e).

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, variabel kompetensi SDM memiliki nilai  $P$  value lebih besar dari 0,05 (5%) yaitu sebesar 0.312. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LSKP-TW sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Teori *Resourced-Based View* menyatakan bahwa kompetensi SDM sebagai suatu sumber daya organisasi termasuk ke dalam kekuatan organisasi sehingga semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki sebuah organisasi seharusnya semakin tinggi pula kualitas LSKP-TW yang dihasilkan. Namun, terdapat kontradiksi antara teori dan hasil penelitian yang dapat dijelaskan dengan melihat antara nilai *loading factor* indikator dengan persepsi responden terhadap indikator-indikator kompetensi SDM (Hidayat & Nugroho, 2020).

Tiga indikator kompetensi SDM dengan nilai *loading factor* tertinggi adalah KOM 8 sebesar 0.845, KOM 10 sebesar 0.812, dan KOM 6 sebesar 0.803. KOM 8 terkait dengan kemampuan adaptasi yang baik atas perubahan yang terjadi di dalam organisasi, KOM 10 terkait dengan kemampuan penyusun LSKP-TW bekerja sama dengan berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda, dan KOM 6 terkait dengan kemampuan penyusun LSKP-TW memastikan kualitas pekerjaannya telah sesuai dengan standar yang ada. Ketiga indikator tersebut menjadi penggerak utama keberpengaruhan kompetensi SDM terhadap kualitas LSKP-TW. Namun, nilai rata-rata indikator berdasarkan persepsi responden terhadap ketiga indikator ini justru menunjukkan nilai yang bertolak belakang. Rata-rata responden menganggap bahwa kemampuan adaptasi penyusun LSKP-TW dalam menghadapi perubahan organisasi belum cukup memadai. Berdasarkan diskusi dengan Kepala Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah, salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya program “Kemenkeu Satu” yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Program tersebut menyebabkan rotasi pegawai dan lingkup pekerjaan pegawai tidak terbatas pada instansi sebelumnya, pekerjaan sebelumnya, dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pegawai tidak selalu memiliki bekal yang sesuai dan memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi yang baru.

Indikator KOM 6 memiliki nilai rata-rata terendah dari seluruh indikator kompetensi SDM. Hal ini dapat diartikan bahwa responden belum dapat memastikan bahwa kualitas LSKP-TW yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang ada. Berdasarkan pernyataan Kepala Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah, hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak seluruh penyusun LSKP-TW memahami secara mendalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah. LSKP-TW memiliki perbedaan nama akun, jenis struktur klasifikasi yang berbeda pada neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas, cara pengungkapan informasi yang berbeda, serta definisi dan nilai total akun yang berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah biasa (Kemenkeu, 2014). Nilai rata-rata indikator KOM 1 yang cukup rendah juga menunjukkan bahwa tidak seluruh penyusun LSKP-TW memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang menyebabkan penyusunan laporan keuangan masih perlu ditunjang oleh bantuan teknologi informasi. Kepala Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah menyatakan bahwa penyusun LSKP-TW memang sangat mengandalkan data dan informasi yang dihasilkan aplikasi SIKRI. Penyusun LSKP-TW cenderung tidak melakukan pemeriksaan kembali (*self checking*) atas data dan informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIKRI karena masih belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk memberikan analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap kualitas LSKP-TW. Keseluruhan faktor-faktor tersebut dianggap menjadi penyebab tidak berpengaruhnya kompetensi SDM terhadap kualitas LSKP-TW. Hasil ini tidak konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Muda et al., 2017; Zubaidi et al., 2019, dan Andini & Yuraswati, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi et al. (2017) dan Syarifudin (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Variabel teknologi informasi memiliki P values sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 menandakan variabel teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LSKP-TW sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Dengan nilai *original sample* sebesar 0.593, setiap kenaikan satu standar deviasi pada variabel teknologi informasi akan terjadi kenaikan nilai pada variabel kualitas LSKP-TW sebesar 0.593 standar deviasi dengan asumsi variabel lain pada model nilainya konstan. Nilai *loading factor* indikator teknologi informasi menunjukkan

penyediaan data yang komprehensif dan relevan untuk digunakan dalam penyusunan LSKP-TW melalui aplikasi SIKRI memiliki kontribusi yang signifikan atas pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW. Nilai rata-rata indikator TI 2 sebesar 5.147, TI 1 sebesar 4.987, dan TI 4 sebesar 4.973 menunjukkan bahwa melalui penggunaan aplikasi SIKRI responden setuju data yang didapatkan relevan, mudah dipahami, dan komprehensif. Aplikasi SIKRI telah mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah pusat dan sistem keuangan pemerintah daerah sehingga penyusun LSKP-TW dapat langsung melakukan permintaan penarikan data sesuai kebutuhan. Penyusun LSKP-TW juga tidak perlu meminta data keuangan secara langsung terutama untuk data keuangan pemerintah daerah karena aplikasi SIKRI telah menyediakan data keuangan yang dibutuhkan secara *real time* dan komprehensif.

Penggunaan aplikasi SIKRI memudahkan penyusun LSKP-TW untuk mengurangi beban pekerjaan yang sifatnya klerikal dan kesalahan yang tergolong human error seperti salah menjumlahkan dan salah input angka. Hal ini sejalan dengan persepsi responden yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan LSKP-TW yang menyebabkan laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Indriasari & Nahartyo (2008) dalam Chodijah & Hidayah (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi membantu organisasi dalam mengolah data dengan volume transaksi yang besar serta data yang tergolong kompleks. Teknologi informasi mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berbagai hambatan yang selama ini juga dialami pada penyusunan LSKP-TW seperti tahapan penyusunan yang panjang, data yang terlampau banyak, dan keterbatasan sumber daya manusia dapat diminimalkan dengan adanya aplikasi SIKRI. Berdasarkan diskusi dengan salah satu Pelaksana Seksi ASPLK, penyusun LSKP-TW merasakan berbagai manfaat dari penggunaan aplikasi SIKRI berupa otomatisasi dalam proses konsolidasi laporan keuangan dan penyajian hasil laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016), Chodijah & Hidayah (2018), dan Mutiana et al. (2017). Berdasarkan teori *Resource-Based View*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya yang tercermin dalam variabel kualitas LSKP-TW dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat meningkatkan kinerja penyusun LSKP-TW melalui penggunaan aplikasi SIKRI, selalu menyediakan data yang komprehensif melalui aplikasi SIKRI, dan selalu mengembangkan aplikasi SIKRI agar penyusunan LSKP-TW lebih efisien dan efektif.

Interaksi antara variabel kompetensi SDM dan variabel kepemimpinan digital memiliki nilai P value sebesar 0.314. Nilai P value > 0.05 menandakan variabel kepemimpinan digital tidak memiliki dampak yang signifikan untuk memoderasi pengaruh antara variabel kompetensi SDM dan variabel kualitas LSKP-TW sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil perbandingan nilai *loading factor* indikator kepemimpinan digital menunjukkan bahwa aspek pimpinan yang memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan organisasi (KD 9) merupakan salah satu penggerak utama berpengaruhnya kepemimpinan digital terhadap kualitas LSKP-TW. Akan tetapi, berdasarkan nilai rata-rata indikator variabel kepemimpinan digital, nilai rata-rata indikator KD 9 merupakan nilai terendah. Hal ini dapat diartikan bahwa pimpinan Kanwil DJPb masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pemenuhan pendidikan dan pelatihan bagi penyusun LSKP-TW. Berdasarkan diskusi dengan salah satu Pelaksana Seksi ASPLK, pimpinan berfokus memberikan saran dan masukan hanya terhadap hasil akhir LSKP-TW dan masih belum banyak yang turut memperhatikan aspek sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyusun LSKP-TW saat proses penyusunan laporan tersebut. Kepala Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah menambahkan bahwa pimpinan memang cenderung memercayakan proses penyusunan LSKP-TW kepada penyusun LSKP-TW sepenuhnya karena pimpinan

meyakini bahwa penyusun LSKP-TW telah memiliki dasar kemampuan yang memadai dan masih memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mempelajari hal-hal baru. Salah satu Pelaksana Seksi ASPLK menyatakan penyediaan pendidikan dan pelatihan penggunaan aplikasi SIKRI lebih banyak diberikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) DJPb. Dit. APK memfasilitasi adanya *Focus Group Discussion* (FGD) dan sharing session antar Kanwil DJPb setiap bulan yang mendorong penyusun LSKP-TW untuk mempelajari penyusunan LSKP-TW dan penggunaan aplikasi SIKRI.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori *Resource-Based View* karena pimpinan Kanwil DJPb masih belum dapat memanfaatkan secara optimal potensi yang dimilikinya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sebagai variabel moderasi, kepemimpinan digital belum dapat menciptakan keunggulan kompetitif berupa peningkatan kualitas LSKP-TW. Variabel kepemimpinan digital justru memiliki pengaruh yang signifikan apabila diposisikan sebagai variabel independen. Hal ini ditunjukkan melalui nilai P value  $< 0.05$  yaitu sebesar 0.030. Variabel moderasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel moderasi tetapi memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel independen disebut sebagai variabel moderasi prediktor (Sumiyati, 2019).

Interaksi antara variabel teknologi informasi dan variabel kepemimpinan digital memiliki nilai P value sebesar 0.383. Nilai P value  $> 0.05$  menandakan variabel kepemimpinan digital tidak memiliki dampak yang signifikan untuk memoderasi pengaruh antara variabel teknologi informasi dan variabel kualitas LSKP-TW. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) juga ditolak. Gaya kepemimpinan digital dinyatakan tidak berpengaruh untuk mengubah hubungan teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW. Hal ini dapat disebabkan karena teknologi informasi dalam lingkup penyusunan LSKP-TW yaitu aplikasi SIKRI telah wajib digunakan untuk menyusun LSKP-TW (Salia & Wibowo, 2022). Ada atau tidaknya arahan dari pimpinan, penerapan dan penggunaan aplikasi SIKRI akan tetap dilakukan.

Berdasarkan nilai rata-rata indikator KD 11 sebesar 5.400, responden merasakan bahwa pimpinan belum memahami secara memadai tren penggunaan teknologi informasi yang ada untuk memberikan saran dan masukan. Di sisi lain, aspek pimpinan yang memahami tren penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas LSKP-TW ditunjukkan oleh nilai *loading factor* indikator KD 11 sebesar 0.890. Berdasarkan diskusi dengan Kepala Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah, penyusun LSKP-TW saat ini dianggap lebih mengetahui dan lebih mengikuti perkembangan teknologi yang ada dibandingkan dengan pimpinan. Kondisi ini menyiratkan bahwa pimpinan masih perlu untuk beradaptasi dan mencari informasi lebih banyak terkait perkembangan teknologi informasi untuk dapat memaksimalkan potensi pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Era transformasi digital yang dinamis dan juga bergerak cepat turut menuntut pimpinan untuk dapat memberikan solusi inovatif dan kreatif agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nilai rata-rata indikator KD 8 sebesar 5.480 dapat diartikan bahwa responden merasa pimpinan setuju pimpinan telah menerapkan perilaku inovatif dan kreatif, namun masih terdapat ruang untuk adanya peningkatan sampai responden merasa sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan Kanwil DJPb masih belum dapat menginternalisasi gaya kepemimpinan digital secara optimal. Hal ini dianggap menjadi penyebab variabel kepemimpinan digital belum dapat memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW sehingga hasil penelitian belum sejalan dengan teori *Resource-Based View*. Variabel kepemimpinan digital justru memiliki pengaruh yang signifikan apabila sebagai variabel independen. Hal ini ditunjukkan melalui nilai P values  $< 0.05$  yaitu sebesar 0.030. Variabel moderasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel moderasi tetapi memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel independen disebut sebagai variabel moderasi prediktor (Sumiyati, 2019).

**PENUTUP****Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dengan kepemimpinan digital sebagai variabel moderasi. Analisis dan pengujian data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LSKP-TW. Variabel teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LSKP-TW. Variabel kepemimpinan digital tidak dapat memoderasi baik pengaruh kompetensi SDM maupun teknologi informasi terhadap kualitas LSKP-TW. Hasil penelitian berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (i) kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LSKP-TW; (ii) teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LSKP-TW; (iii) kepemimpinan digital tidak memiliki dampak yang signifikan untuk memoderasi pengaruh antara variabel kompetensi SDM dan variabel kualitas LSKP-TW; dan (iv) kepemimpinan digital tidak memiliki dampak yang signifikan untuk memoderasi pengaruh antara variabel teknologi informasi dan variabel kualitas LSKP-TW.

**Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan di antaranya adalah populasi pegawai seksi Analitika, Statistika, dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb seluruh Indonesia yang hanya berjumlah sebanyak 75 orang menghambat penulis untuk melakukan *pilot study* karena jumlah sampel yang digunakan pada penelitian akan semakin terbatas. Indikator kompetensi teknis untuk variabel kompetensi SDM juga masih belum dapat menggambarkan secara penuh kompetensi SDM penyusun LSKP-TW karena sebagian indikator tidak lulus uji validitas. Selain itu, jenis variabel kepemimpinan yang digunakan yaitu kepemimpinan digital masih belum dapat memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Oleh karena itu, masih terdapat ruang untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya dengan memperluas jumlah responden dan pemilihan variabel serta pengembangan indikator yang lebih sesuai dengan objek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- Ananda, N. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1).
- Andini, D. & Yusrawati. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Kiat* Vol. 26, No. 1 (2015), Hal. 33-41
- Australian Bureau of Statistics. (2015). Australian System of Government Finance Statistics: Concepts, Sources and Methods. [https://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/FA8D8462924F3254CA257E92001B15AA/\\$File/55140\\_2015%20preliminary.pdf](https://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/FA8D8462924F3254CA257E92001B15AA/$File/55140_2015%20preliminary.pdf) (diakses 11 November 2023).
- Baihaqi, B., & Halim, A. (2020). Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penerapan Statistik Keuangan pemerintah. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1).



- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, 17(1), 99-120.
- Boomer, L. G. (2019). 10 skills for digital leadership. *Accounting Today*, 33(1), 24-24
- Brunner, M., Gonzalez-Castañé, G., & Ravesteijn, P. (2021). How Digital Leadership competences and IT Capabilities affect an organization's ability to digitally transform and adopt new technologies. *Journal of International Technology and Information Management*, 30(4), 139-156.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34-48.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information systems*, 19(4), 9-30.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-271/PB/2019 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2018. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-267/PB/2020 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2019. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-286/PB/2021 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2020. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). Regional Chief Economist: Pertajam Peran RCE, Pastikan APBN dan APBD Benar-Benar Bermanfaat Untuk Rakyat. Treasury Indonesia (Vol.3/2021, pp. 14-17).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2023 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2022. Jakarta
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Kurniawati, M. D., Dewo, A. Y. P., Baihaqi, A. F., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 1004-1013.
- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020). Implementation of accrual based accounting on regional property in Indonesia: competence employees and organizational commitments perspective. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9502-9512.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)., 3rd Ed., Thousand Oakes, CA: Sage.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European business review*, 31(1), 2-24.

- Hair, Jr., Joseph F., et. al. (2011). *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition. New Jersey: PrenticeHall, Inc.
- Hakim, M. L. N., & Wibowo, P. (2019). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi pada BLU Kesehatan. *Balance Vocation Accounting Journal*, December 2021, 140-153.
- Heliang, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiarni* (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21).
- Hermelinda, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi Unihaz – JAZ*
- Hertati, L., & Zarkasyi, I. (2015). Competence of human resources, the benefits of information technology on value of financial reporting in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(8), 12-18.
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Idzdiana, F., Agriyanto, R., & Rahmiyanti, F. (2023). The Effect of Human Resources Capabilities, Application of Systems of Internal Control, and The Use of Information Technology on The Quality of Local Government Accountability Report. *Global Financial Accounting Journal*, 7(1), 1-13.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan fiskal: Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 595-516.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 275/PMK.05/2014 Tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.05/2018 Tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Jakarta
- Kusanke, K., Kendziorra, J., Pilgenroeder, S., Christmann-Schwaab, T., & Winkler, T. J. (2023). Building Digital Leadership In The Public Sector-A Literature Review. *Thirty-first European Conference on Information Systems (ECIS 2023)*.
- Magesa, M., Jonathan, J., & Urassa, J. (2023). Digital Literacy of Smallholder Farmers in Tanzania. *Sustainability*, 15(17), 13149.
- Mahmoodi, R. K., & Nojedeh, S. H. (2016). Investigating the Effectiveness of E-government Establishment in Government Organizations. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 230, 136-141.
- Muda, I., Wardani, D. Y., Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95(20).

- Munsamy, M., Dhanpat, N. & Barkhuizen, E.N. (2023). The development and validation of a digital leadership competency scale. *Acta Commerci* 23(1), a1057. <https://doi.org/10.4102/ac.v23i1.1057>
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, Kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap Kualitas laporan keuangan (studi pada satker di lingkungan kementerian agama kabupaten aceh utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 3(2), 151-167.
- Nangarumba, M. (2016). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2), 114-130.
- Ongkorahardjo, et al. (2008). Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1, Mei 2008: 11-21
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Pering, I. M. A. A. (2020). Kajian Analisis Jalur Dengan Structural Equation Modeling (Sem) Smart-Pls 3.0. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(2), 28-48.
- Purwanto, A., Purba, J. T., Bernarto, I., & Sijabat, R. (2021). Pengaruh Servant, Digital dan Green leadership Terhadap Kinerja Industri Manufaktur Melalui Mediasi Komitmen Organisasi. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 1-13.
- Purwoko, S., Rokhman, A., & Tobirin, T. (2022). E-Leadership: Konsep Dan Pengaruh Kepemimpinan Digital Dalam Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper 2022 Magister Administrasi Publik*, 170-181.
- Putra, E. A. (2016). Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif). *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, 4(3).
- Saldanha, T. (2019). *Why digital transformations fail: The surprising disciplines of how to take off and stay ahead* (First ed.). Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers, a BK Business Book.
- Salia, F. N., & Wibowo, P. (2022). Ada Apa Dengan Faktor Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 8(1), 63-88.
- Shapiro, S. P. (2005). Agency Theory. *Annual Review of Sociology*, 31(1), 263–284. DOI: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122159
- Shin, J., Mollah, M.A., Choi, J. (2023). Sustainability and Organizational Performance in South Korea: The Effect of Digital Leadership on Digital Culture and Employees' Digital Capabilities. <https://doi.org/10.3390/su15032027>
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 385-416.
- Sumiyati, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1-10.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).

- Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. *Transparansi Hukum*, 2(1).
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 13(2).
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh kompetensi sdm dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.
- Yusuf, M., Satia, H., Bernardianto, R., Nurhasanah, N., Irwani, I., & Setyoko, P. (2023). Exploring the role of digital leadership and digital transformation on the performance of the public sector organizations. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1983-1990.
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68-76.